

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju kearah yang lebih baik dan berkesinambungan (Todaro, 2006). Keberhasilan pembangunan diukur dari berbagai hal, salah satunya yaitu dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia merupakan potensi dan kekayaan dari suatu negara, maka manusia harus selalu menjadi target pembangunan dari suatu negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi potensi bagi pembangunan suatu negara, namun sebaliknya jika sumber daya manusia disuatu negara kurang berkualitas maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan disuatu negara.

Pembangunan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara, karena kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan. Kesejahteraan yang dimaksudkan antara lain: masyarakat dapat menikmati umur panjang, sehat, berpendidikan dan produktif. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan, bukan merupakan alat dari proses pembangunan itu sendiri. Keberhasilan proses pembangunan manusia dapat terlihat dengan keberhasilan suatu negara mengatasi permasalahan-

permasalahan mendasar di negaranya, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf dan gizi buruk (Kacaribu, 2013).

Menurut Yusri (2010), ada tiga alasan pembangunan manusia yang perlu diperhatikan, dikarenakan pertama, banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi gagal mengurangi masalah kesenjangan sosial, ekonomi dan juga kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang berpendapatan tinggi masih belum mampu mengatasi masalah-masalah sosial seperti narkoba, alkohol, AIDS, gelandangan dan KDRT. Ketiga, sedangkan beberapa negara yang masih berpendapatan rendah mampu mencapai pembangunan manusia yang tinggi, jika negara tersebut dapat menggunakan secara bijaksana semua sumber daya yang ada, untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

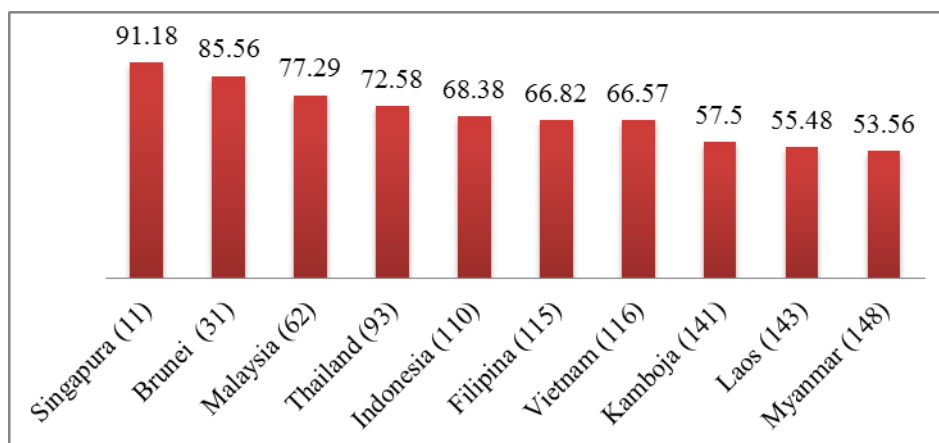
United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan juga perekonomian yang semakin baik. Sebagian negara di dunia, baik negara maju ataupun negara berkembang menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas sumber daya manusianya.

Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut UNDP menyusun IPM yang merupakan ukuran perbandingan tiga dimensi tentang pembangunan manusia.

Pertama yaitu, panjang umur dan kesehatan, yang diukur menggunakan angka harapan hidup saat lahir. Kedua pendidikan, diukur menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Ketiga, standar hidup atau biasa disebut ekonomi yang diukur menggunakan paritas daya beli (PPP) atau penghasilan. Ketiga dimensi tersebut sangat penting untuk menentukan tingkat kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kualitas SDM.

IPM memang bukanlah ukuran menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (Irawan, 2009). IPM sendiri dapat digunakan menjadi salah satu tolak ukur apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

IPM Indonesia masih termasuk dalam kategori sedang, tapi meskipun sudah berada dikategori sedang, IPM Indonesia pada tahun 2014 masih berada pada rangking 110 dari 188 negara dengan 68,38. Hal ini terjadi karena cenderung masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan manusia di Indonesia, alokasi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Alokasi pengeluaran pemerintah untuk sosial selama ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Malaysia, Filipina dan Thailand (Irawan, 2009).



Sumber: UNDP, 2015

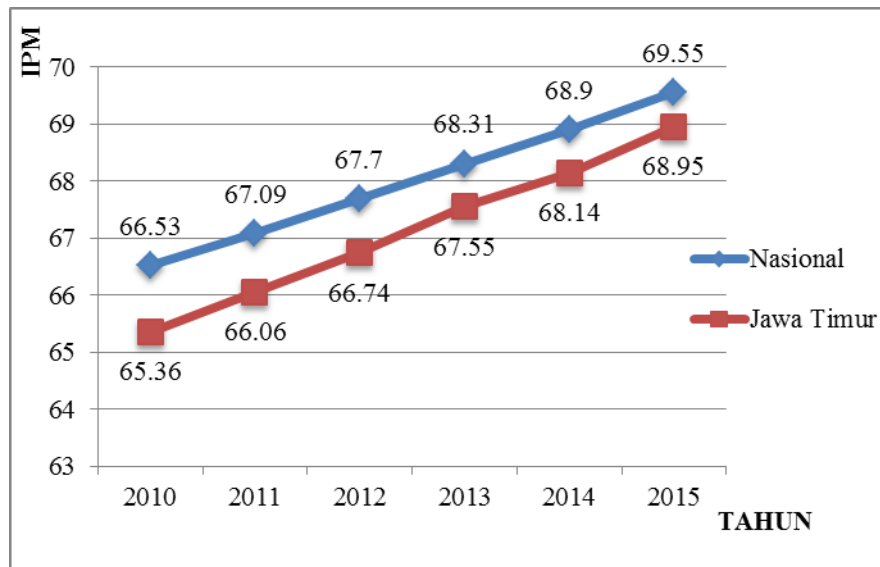
Gambar 1. 1.
IPM Negara-Negara di ASEAN

IPM Indonesia berada diperingkat 5 diantara seluruh negara ASEAN dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Singapura merupakan negara dengan IPM tertinggi di ASEAN, IPM Singapura mencapai 91,18 menempati peringkat 11 di dunia dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan Myanmar merupakan negara dengan IPM terendah di ASEAN, IPM Myanmar mendapat peringkat 148 di dunia dan termasuk dalam kategori rendah dengan IPM sebesar 53,56. Tetapi meskipun begitu, peningkatan IPM Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin meningkat.

Kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan dan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu adanya paradigma baru

yaitu pembangunan yang mengedepankan aspek pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Rustariyuni, 2014).

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah ditingkat daerah baik provinsi atau kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk mengatur program pembangunannya. Pemerintah daerah dapat mengatur anggarannya sendiri, menetapkan upah minimum, termasuk juga mengembangkan potensi sumberdaya yang ada melalui program pembangunan manusianya. Potensi daerah yang dimaksud termasuk potensi sumberdaya manusia (SDM). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur kebijakannya dalam program pembangunan manusia, sehingga akan memacu perkembangan potensi SDM di setiap daerah itu sendiri. Dengan majunya SDM di tiap daerah akan membuat sumberdaya yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.



Sumber: BPS Jatim, 2016

Gambar 1. 2

IPM Indonesia dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015

Gambar diatas menunjukkan perhitungan IPM oleh BPS sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai 2015 IPM di Indonesia sudah naik sebesar 3,02 poin. Pada tahun 2015 pencapaian IPM di Indonesia mencapai 69,55, meningkat 0,65 poin dibanding tahun 2014. Pada periode tahun 2014-2015 pembangunan manusia tumbuh sebesar 0,94 persen, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia.

Tabel 1. 1
Pertumbuhan IPM Nasional dan Jawa Timur Tahun 2010-2015 (Persen)

Tahun	Nasional	Jawa Timur
2010-2011	0,84	1,07
2011-2012	0,91	1,03
2012-2013	0,90	1,21
2013-2014	0,86	0,87
2014-2015	0,94	1,19

Sumber: BPS Jatim, 2016

Meskipun IPM Jawa Timur masih lebih rendah dibandingkan IPM Nasional tapi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan juga tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi di Provinsi Jawa Timur tapi IPM Provinsi Jawa Timur tetap menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan pertumbuhan IPM Jawa Timur selalu berada diatas pertumbuhan IPM nasional. Dari tahun 2010 sampai 2015 IPM Jawa Timur naik sebesar 3,59 poin, lebih tinggi dibanding nasional yang hanya 3,02 poin. Pada periode waktu 2014-2015 IPM nasional naik 0.94 persen, sedangkan IPM Jawa Timur naik 1,19 persen.

Pertumbuhan IPM Jawa Timur merupakan salah satu yang yang tertinggi di Indonesia, pertumbuhan IPM Jawa Timur merupakan yang terbesar kedua setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pertumbuhan sebesar 1,37 persen, dan di atas Provinsi Sulawesi Barat yang berada diposisi ketiga dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,17 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini menunjukkan terjadinya peningkatan komponen-

komponen pembentuk pembangunan manusia sehingga akan dapat memacu perekonomian diberbagai sektor.

Tabel 1. 2
IPM Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99
Jawa Barat	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50
Jawa Tengah	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49
DI Yogyakarta	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59
Jawa Timur	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95
Banten	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27

Sumber: BPS Jatim, 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur selalu memiliki IPM terendah di Pulau Jawa. DKI Jakarta merupakan Provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia dengan 78,99. Diikuti oleh DI Yogyakarta dengan 77,59 kemudian Banten 70,27, Jawa Barat 69,5, Jawa tengah 69,49 dan Jawa Timur dengan 68,98. IPM Jawa Timur merupakan yang terendah dipulau Jawa, hal ini terjadi karena kurangnya peran pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan unsur-unsur pembangunan manusia antara lain: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Namun meski IPM Provinsi Jawa Timur merupakan yang terendah tetapi IPM Provinsi Jawa Timur mempunyai tren positif membuat rangking IPM Provinsi Jawa Timur cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 IPM Provinsi Jawa Timur menempati peringkat 19, kemudian naik 1 peringkat menjadi rangking 18 pada tahun 2012 dan menjadi rangking 16 nasional pada tahun 2015, meskipun terjadi kenaikan peringkat namun peringkat IPM di Provinsi Jawa Timur masih yang terendah di pulau

Jawa, berbeda dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang merupakan daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia.

Wilayah Eks Karesidenan Madiun merupakan wilayah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur bagian barat daya. Wilayah ini terdiri dari enam wilayah yang terdiri dari lima kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun.

Tabel 1. 3
IPM Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun Tahun 2012-2015

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2012		2013		2014		2015	
	IPM	Rank	IPM	Rank	IPM	Rank	IPM	Rank
Kabupaten Pacitan	62,94	28	63,38	30	63,81	30	64,92	29
Kabupaten Ponorogo	66,16	22	67,03	21	67,4	21	68,16	21
Kabupaten Madiun	67,32	18	68,07	18	68,6	18	69,39	18
Kabupaten Magetan	69,56	11	69,86	12	70,29	12	71,39	11
Kabupaten Ngawi	66,72	20	67,25	20	67,78	20	68,32	20
Kota Madiun	77,21	3	78,41	3	78,81	3	79,48	2

Sumber: BPS Jatim, 2016

Peringkat IPM kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun bervariasi, kota Madiun berada di urutan atas. IPM kota Madiun termasuk dalam katagori tinggi yaitu sebesar 79,48, itu lebih besar dibanding IPM nasional dan Provinsi Jawa Timur. IPM Kota Madiun pada tahun 2010-2014 selalu menempati peringkat 3 dan pada tahun 2015 naik menjadi peringkat kedua berada di bawah kota Malang di urutan pertama dan disusul Kota Surabaya di peringkat ketiga. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun kedepan IPM Kota Madiun akan masuk dalam katagori sangat tinggi melihat dengan tren positif

IPM di Kota Madiun. Hal berbeda terjadi untuk Kabupaten Madiun yang masih berada diperingkat tengah. IPM Kabupaten Madiun masih termasuk dalam katagori sedang dengan IPM sebesar 69.39 dengan peringkat 18 sejak tahun 2012 hingga 2015. Namun tren IPM Kabupaten Madiun yang selalu positif dan selalu naik bukan tidak mungkin kategori IPM Kabupaten Madiun akan naik menjadi kategori tinggi. Sedangkan untuk IPM Kabupaten Magetan termasuk kategori tinggi dengan IPM sebesar 71,39 lebih besar dibanding IPM nasional dan Provinsi Jawa Timur dan pada tahun 2015 menempati peringkat 11. Sedangkan untuk Kabupaten Ngawi masih termasuk dalam kategori sedang dengan IPM sebesar 68.32 berada pada peringkat 20 sejak tahun 2011 sampai 2015. Dan untuk IPM Kabupaten Pacitan juga masih berada dikategori rendah dengan IPM sebesar 64.92 membuat Kabupaten Pacitan berada diurutan bawah dengan peringkat 29 pada tahun 2015 dari 37 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Tetapi meskipun IPM Kabupaten Pacitan masih dalam kategori rendah pertumbuhan IPM Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sebesar 1,75 persen merupakan tercepat ketiga di provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Blitar.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, angka kemiskinan absolut Provinsi Jawa Timur merupakan yang terbesar di Indonesia mencapai 4,78 juta jiwa. Presentase jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 merupakan yang terbesar di pulau Jawa dengan 14,55 persen. Disaat provinsi lain di pulau Jawa dapat mengurangi presentase jumlah penduduk miskin, Provinsi Jawa

Timur malah meningkat presentase jumlah penduduk miskin. Peningkatan presentase jumlah penduduk miskin di Jawa Timur juga relatif besar, meningkat 1,82 persen di banding tahun sebelumnya, sedangkan DKI Jakarta hanya naik sebesar 0,37 persen.

Sama seperti Provinsi Jawa Timur kemiskinan di Eks Karesidenan Madiun pada periode 2010 sampai dengan 2015 juga merupakan masalah dalam pembangunan manusia, hal ini terlihat pada besarnya presentase dan jumlah penduduk miskin di Eks Karesidenan Madiun cenderung berfluktuatif kecuali kemiskinan di Kota Madiun yang mempunyai tren negatif dan cenderung selalu turun dari tahun ke tahun. Sedangkan Kabupaten Ngawi adalah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 129.300 orang, meningkat 6200 orang dari tahun sebelumnya. Dengan tinggi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan beberapa kabupaten di Eks Karesidenan Madiun wilayah tersebut masih terjadi peningkatan IPM bahkan diantara cukup besar. Kabupaten Pacitan adalah kabupaten dengan presentase penduduk miskin terbesar di Eks Karesidenan Madiun dengan 16,68 persen, naik sekitar 0,5 persen dibanding tahun lalu. Tapi dengan kenaikan kemiskinan yang terjadi Kabupaten Pacitan malah mengalami pertumbuhan IPM terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi penghambat dari proses pembangunan. Kemiskinan memang merupakan salah satu masalah yang kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk di berbagai daerah di Indonesia (Prawoto, 2009).

Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk sering diukur menggunakan indikator rasio gini. Rasio gini Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun berada dalam kategori rendah. Tetapi meskipun begitu terlihat bahwa tren rasio gini berfluktuatif dan cenderung meningkat, bukan berarti dalam beberapa tahun kedepan rasio gini Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun dapat masuk dalam kategori sedang jika Rasio Gini sudah naik melewati 0,4. Rasio gini Kota Madiun merupakan yang terbesar yaitu sebesar 0,38 sedangkan Kabupaten Madiun terendah dengan 0,32. Dengan adanya ketimpangan distribusi pendapatan walaupun nilai rasio gini masih termasuk dalam kategori rendah. Hal tersebut tetap berpengaruh terhadap IPM, dimana walaupun IPM meningkat setiap tahunnya namun menyebabkan peningkatan IPM tidak secara tidak maksimal, karena masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Kenaikan Rasio gini berarti telah terjadi peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan, hal ini bisa berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dan akhirnya dapat menurunkan indeks pembangunan manusia (Basuki & Saptutyningasih, 2016).

Kota Madiun mempunyai upah minimum terbesar di Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun pada tahun 2015 berada di dengan Rp.1.250.000, diikuti oleh Kabupaten Madiun dengan upah minimum sebesar Rp.1.201.750 dan Kabupaten Ngawi dengan upah minimum sebesar Rp.1.196.000. Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi merupakan kabupaten/kota dengan upah tertinggi ke 30, 31 dan 32 dari total 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo, Kabupaten

Pacitan dan Kabupaten Magetan sama-sama dengan upah minimum sebesar Rp.1.150.000. Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Magetan merupakan kabupaten dengan upah minimum terkecil dari seluruh 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Meskipun upah minimum kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun pada tahun 2010-2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan upah minimum di kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun masih sangat kecil dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur. Meskipun dengan upah minimum masih tergolong kecil, bahkan beberapa kabupaten termasuk kabupaten dengan upah minimum terkecil di Provinsi Jawa Timur. IPM di Kota Madiun merupakan yang terbesar kedua di Jawa Timur. IPM Kota Madiun dan Kabupaten Magetan juga masuk dalam kategori kelompok tinggi, dan juga Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten dengan pertumbuhan IPM tercepat ketiga di Provinsi Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun sebagai objek penelitian karena Eks Karesidenan Madiun masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang notabennya merupakan provinsi dengan IPM selalu terendah di pulau Jawa dan juga merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terbesar di pulau Jawa. Namun walaupun demikian Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan IPM tercepat kedua di Indonesia. Hal serupa juga terlihat untuk untuk kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun. Ada Kabupaten Ngawi dengan jumlah penduduk miskin yang banyak dan juga Kabupaten Pacitan merupakan wilayah di Eks

Karesidenan Madiun dengan tingkat kemiskinan terbesar, tapi pertumbuhan IPM Kabupaten Pacitan merupakan yang tercepat kedua diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur. Hal lain terjadi untuk Kota Madiun yang juga masuk wilayah Eks Karesidenan Madiun, Kota Madiun merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah dan merupakan wilayah dengan IPM tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur. Beberapa kabupaten/kota lain di Eks Karesidenan Madiun merupakan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sekaligus merupakan wilayah dengan tingkat upah minimum terendah serta ketimpangan distribusi yang cenderung meningkat dari tahun ketahun tapi tetap menunjukkan peningkatan indeks pembangunan manusia setiap tahunnya.

Hal tersebut merupakan alasan peneliti memilih kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Madiun sebagai objek penelitian dikarenakan kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun mempunyai IPM yang bervariasi, jumlah penduduk miskin yang juga bervariasi walaupun dengan wilayah yang berdekatan sehingga bagi penulis hal ini dianggap fenomena unik dan menarik. Peningkatan IPM sendiri juga merupakan hal yang sangat menarik, karena IPM merupakan gambaran pencapaian kinerja dari pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang handal yang dapat mengembangkan perekonomian suatu wilayah.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks Karesidenan Madiun periode 2010-2015”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas, tetap terarah dan terfokus, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu hanya meneliti indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk miskin, rasio gini dan upah minimum kabupaten/kota di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode tahun 2010-2015.
2. Apakah rasio gini berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode tahun 2010-2015.
3. Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode tahun 2010-2015.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode tahun 2010-2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio gini terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode tahun 2010-2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap indeks pembangunan manusia di Eks Karesidenan Madiun periode tahun 2010-2015.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi baru bagi pembaca dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat mengkaji topik yang sama tetapi dengan metode atau pendekatan yang berbeda.

2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan sebagai sumber data baru yang dapat dikembangkan lagi dan juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan masukan dan rekomendasi untuk pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan manusia.